

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah dapat selesai dikerjakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah ini disusun guna memenuhi amanat yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari implementasi SAKIP Pemerintah daerah yang diselenggarakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pencapaian dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Menjadi salah satu prosedur dalam pengendalian, Perangkat Daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dalam mengelola sumber daya yang ada berdasarkan perencanaan strategis yang sudah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi bupati melalui progress pencapaian tujuan dan sasaran daerah pada setiap tahunnya.

Kami harapkan Laporan Kinerja ini bisa menjadi salah satu alat ukur dan media informasi terkait capaian keberhasilan dan evaluasi kegagalan bagi perangkat daerah dalam meningkatkan capaian kinerja pembangunan dan umpan balik pencapaian prestasi kerja pada setiap tahun kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi Dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang sains dan telekomunikasi, dan statistik. Dinas Komunikasi Dan Informatika yang berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 14, Telepon (024) 76901553 Fax. Ungaran 50511 dipimpin oleh Kepala Dinas Sunarto, S.H., M.H. yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian

Dinas Komunikasi dan Informatika yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian.
- d. pelaksanaan administrasi Dinas.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Daftar Jabatan Dan Eselon Dinas Komunikasi Dan Informatika

NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH
Kepala Dinas	I Ib	1
Sekretaris	III a	1
Kepala Bidang	III b	3
Kepala Subbagian	IV a	2
Kepala Seksi	IV a	6
Jumlah		13

Dinas Komunikasi Dan Informatika **mempunyai susunan Organisasi :**

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi :
 1. Seksi Informasi Publik.
 2. Seksi Komunikasi Publik.
- d. Bidang Aplikasi dan Informatika membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi.

2. Seksi Pengelolaan *E-Government* dan Aplikasi.

e. Bidang Persandian dan Statistik membawahi:

1. Seksi Persandian.
2. Seksi Statistik.

B. Ketersediaan Sumber daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, perangkat daerah ini didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 44 personil, yang terdiri dari 35 personil PNS, dan 9 personil Non PNS

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

Klasifikasi	Jumlah
Komposisi Menurut Golongan	
• Golongan IV	5
• Golongan III	19
• Golongan II	8
• Golongan I	1
• Non PNS	9
Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan	
• Sarjana S2	7
• Sarjana S1	12
• Sarjana Muda / D3	4
• SLTA	9
• SMP	1
• SD	0
Komposisi Menurut Umur	
• 20 – 30 tahun	1
• 31 – 40 tahun	8
• 41 – 50 tahun	10

Klasifikasi	Jumlah
• 51 – 58 tahun	14
Jumlah	33

C. Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja

Gambaran sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)	Kondisi
Tanah	-	-	-
Gedung dan Bangunan	4	2.504.793.855,-	sedang
Peralatan / Mesin	11	9.530.133.453,-	sedang
Jalan irigaasi, jaringan	2	981.352.435,-	sedang
Aset dan lainnya	1	390.459.131,-	sedang
Jumlah		13.406.738.874,-	
Penyusutan		5.442.737.319,86	

D. Ketersediaan Sumber Daya keuangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah pada tahun berkenaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perangkat daerah ini didukung anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pembiayaan	Anggaran
Belanja Tidak Langsung	3.220.803.000
Belanja Langsung :	4.273.660.000
- Belanja Pegawai	66.092.000
- Belanja Barang dan Jasa	3.699.873.000
- Belanja Modal	507.695.000
Jumlah	7.494.463.000

E. Permasalahan Utama

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain sebagai berikut :

1. Satu Data Untuk Pembangunan Kabupaten Semarang.

Untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Semarang dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan Daerah harus dilandasi oleh data dan informasi akurat. Untuk itu pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan landasan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

2. Tuntutan Publik akan keterbukaan informasi dan transparansi.

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, dan terus berupaya mencari informasi yang relevan dengan kondisi yang sedang dihadapinya.

3. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak dibarengi dengan pemenuhan sarana prasarana di bidang komunikasi dan Informasi.

Perkembangan ilmu teknologi informasi yang pesat perlu direspon dan diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan yang bias dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Apabila tidak diantisipasi secara cepat tentu akan membawa eksese yang kurang baik bagi masyarakat.

4. Penyebaran Informasi kurang merata karena kerjasama dengan media cetak, ataupun media elektronik kurang

Penyebaran informasi sangatlah penting bagi Pemerintah daerah, karena merupakan acuan bagi masyarakat guna mengetahui arah dan kebijakan pembangunan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu factor kurangnya pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan media.

5. Masih minimnya kualitas Sumber daya manusia di bidang komunikasi dan

Kualitas SDM yang mumpuni di bidang komunikasi dan informatika sebagai agen pengolah dan penyebar informasi mutlak diperlukan guna memunculkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Maksud dan Tujuan Penyampaian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah kabupaten Semarang berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk implementasi akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya atas penggunaan anggaran yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah memberikan informasi kinerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah kabupaten Semarang dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah berdasarkan tugas pokok fungsi dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara valid dan akuntabel

G. Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja

Pada bagian ini disampaikan dasar dasar hukum yang mendasari pentingnya penyampaian laporan kinerja perangkat daerah sebagai upaya pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah selama masa kerja tahun berkenaan. Antara lain :

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari Tap MPR.
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2010, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

H. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum perangkat daerah, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

Bab II :Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menyajikan ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun berjalan dengan sasaran strategis yang ingin diraih pada tahun sebelumnya, kaitan sasaran tersebut dengan visi – misi dalam Renstra

Bab III :Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis, serta penyajian aspek akuntabilitas keuangan.

Bab IV :Penutup

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja perangkat daerah serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran – lampiran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi dan Misi Perangkat Daerah

Visi

1. PENEKUALAHAN KABUPATEN SEMARANG YANG MAJU, MANDIRI, TERTIB, DAN SEJAHTERA (MATRA II) Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam membantu melaksanakan visi Bupati yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

Misi

1. Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip good governance didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi.

B. Perencanaan Kinerja

Tabel 2.2. Tabel Rencana Kinerja

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan	Target
1	Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas. pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database)	Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik	Indikator ini untuk mengukur tingkat aksestabilitas jaringan komunikasi dan informasi elektronik pada wilayah kabupaten semarang	100,00
		Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan	Presentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah	Indikator ini untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam peningkatan kapasitas dan keterbukaan informasi terkait pembangunan Kabupaten Semarang	0,11
		Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahandan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang	Persentase Sistem Informasi Yang Dapat Diaplikasikan	Indikator ini untuk mengukur tingkat aksestabilitas jaringan komunikasi dan informasi	6,56

		responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal	Secara Optimal	elektronik pada wilayah kabupaten semarang	
--	--	---	----------------	--	--

C. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.2. Tabel Rencana Kinerja

Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target
Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas. pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database)	Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik	100,00 %
	Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan	Presentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah	0,11 %
	Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintah dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal	Persentase Sistem Informasi Yang Dapat Diaplikasikan Secara Optimal	6,56 %

Tabel 2.3. Tabel Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Target
Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik		
Presentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah		
Persentase Sistem Informasi Yang Dapat Diaplikasikan Secara Optimal		

Keterangan: Angka 0 (nol) pada Program merupakan Program yang mendukung lebih dari satu indikator

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Indikator Kinerja

1. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel

1. Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas. pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database)

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	%	Target 2021
Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut.

Tabel Program/Kegiatan Pendukung Kinerja

Indikator Kinerja Utama
Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik

Hambatan/Masalah:

jaringan internet yang terputus bisa dari penyedia internet atau secara fisik kabel putus

Solusi/kebijakan yang diambil:

Jika yang bermasalah adalah provider, maka berkoordinasi dengan provider. jika secara fisik maka segera diperbaiki

Data pendukung capaian indikator

Data Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik

No	Daftar	Keterangan
1	27 OPD di kab Semarang	(termasuk 2 RSUD)
2	19 kecamatan di kab Semarang	
3	27 Kelurahan di Kab. Semarang	
4	4 repeater	PDAM, Telomoyo, Bawen, Ungbar

Data Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik

No	Daftar	Keterangan
1	27 OPD di kab Semarang	(termasuk 2 RSUD)
2	19 kecamatan di kab Semarang	
3	27 Kelurahan di Kab. Semarang	

4	4 repeater	PDAM, Telomoyo, Bawen, Ungbar
---	------------	-------------------------------

2. Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	%	Target 2021
Presentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah	0,11	16,20	0,11	14.609,52	0,11

Indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut.

Tabel Program/Kegiatan Pendukung Kinerja

Indikator Kinerja Utama
Presentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah

Hambatan/Masalah:

Hambatan yang dihadapi untuk pencapaian presentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah antara lain jika website kabupaten diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Solusi/kebijakan yang diambil:

Melakukan backup website secara rutin sehingga jika suatu saat diretas kembali bisa di restore atau dipulihkan secara cepat.

Data pendukung capaian indikator

3. Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintah dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal

--- isi narasi di sini ---

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	%	Target 2021
Persentase Sistem Informasi Yang Dapat Diaplikasikan Secara Optimal	6,56	5,33	6,15	81,33	6,56

Indikator tersebut didukung dengan program kegiatan sebagai berikut.

Tabel Program/Kegiatan Pendukung Kinerja

Indikator Kinerja Utama
Persentase Sistem Informasi Yang Dapat Diaplikasikan Secara Optimal

Hambatan/Masalah:

Sistem Informasi Dapat Diaplikasikan Secara Optimal sangat bergantung jaringan internet. Jika jaringan internet bermasalah maka sistem informasi tidak dapat berjalan dengan normal. Terkadang juga sistem informasi tidak dapat berjalan optimal karena terkendala aliran listrik yang padam. Ketika aliran menyala server harus dinyalakan secara manual.

Solusi/kebijakan yang diambil:

Solusi agar Sistem Informasi ydapat diaplikasikan optimal yaitu dilakukan pengecekan secara

berkala.

Data pendukung capaian indikator

-- belum ada narasi data dukung indikator --

B. Capaian Kinerja Keuangan

Tabel 3.2. Tabel Capaian Kinerja Anggaran

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase (%)
1	Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas. pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database)	Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik	73	77	105
		Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah	100	100	100
		Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal	Persentase Sistem Informasi Yang Dapat Diaplikasikan Secara Optimal	100	100	100

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja perangkat daerah di lingkup Dinas Komunikasi Dan Informatika yang merupakan Pelaporan hasil kinerja pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021 pelaksanaan RPJMD periode 2016 – 2021 yang menyajikan capaian keberhasilan maupun kendala dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan melalui pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah, hal ini tercermin pada capaian setiap Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian kinerja menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur daerah dan masyarakat. Kemudian Dalam mengukur efektifitas dan efisiensi kinerja, berdasarkan tabel perbandingan capaian Kinerja dengan capaian Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika, dalam mewujudkan visi, misi pembangunan tahun 2016-2021 melalui pencapaian 3 Indikator Kinerja pada 1 tujuan dan 3 sasaran mencapai total rata rata $\pm 4.930,28\%$ dengan realisasi anggaran dibandingkan target sebesar 0,00%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi Keuangan terhadap hasil kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika. Berikut merupakan hasil perbandingan capaian Indikator kinerja terhadap realisasi anggaran.

Tabel 4.1. Tabel perbandingan capaian Indikator kinerja terhadap realisasi anggaran

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Keterangan
1	Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas. pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database)	Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik	100,00	98,76	
		Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase masyarakat yang mengakses media informasi	100,00	100	

			pembangunan daerah			
		Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintah dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal	Persentase Sistem Informasi Yang Dapat Diaplikasikan Secara Optimal	81,33	100	